



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ridwan Djamaluddin  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan  
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

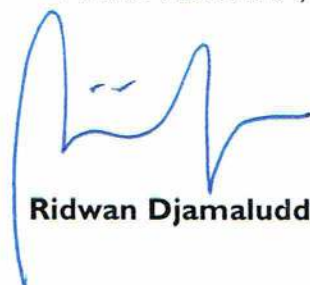
Jakarta, 10 Januari 2019


PIHAK KEDUA,



**Luhut B. Pandjaitan**

PIHAK PERTAMA,



**Ridwan Djamaluddin** 

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI**  
**INFRASTRUKTUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>TARGET TAHUNAN</b>
<b>Customer Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Poros Maritim	1	Persentase Realisasi Investasi Infrastruktur Maritim di Kawasan Timur Indonesia terhadap Realisasi Investasi Infrastruktur Maritim Nasional	60%
		2	Persentase Biaya Logistik Nasional terhadap PDB	21,5%
		3	Persentase Rekomendasi dan Pengendalian Kebijakan kemaritiman yang menjadi dasar penerbitan kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	50 %
<b>Internal Business Process Perspective</b>				
SS.2	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur	4	Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur yang menjadi Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman	10
SS.3	Terselesaikannya Tugas Tambahan Lainnya di Bidang Infrastruktur yang diberikan Pimpinan	5	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100%
<b>Learning and Growth Perspective</b>				
SS.4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	7	Nilai Evaluasi Internal (AKIP)	≥ 60
		8	Persentase Ketaatan Penyampaian Laporan	100%
SS.5	Terkelolanya Anggaran Secara Optimal	9	Persentase Realisasi Anggaran	≥ 85%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Koordinasi Infrastruktur Konektifitas dan Sistem Logistik	Rp 4.263.772.000,-
2.	Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi	Rp 4.263.772.000,-
3.	Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata	Rp 4.263.772.000,-
4.	Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur	Rp 4.263.772.000,-
5.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi	Rp 6.196.151.000,-
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp 23.251.239.000,-</b>

Jakarta, 10 Januari 2019

Menteri Koordinator Bidang  
Kemaritman RI

**Luhut B. Pandjaitan**

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

**Ridwan Djamaluddin**

**LAMPIRAN II**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI**  
**INFRASTRUKTUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1.	Persentase Investasi Infrastruktur Kemaritiman untuk Wilayah Timur	1. Persentase Realisasi Investasi Infrastruktur Maritim di Kawasan Timur Indonesia terhadap Realisasi Investasi Infrastruktur Maritim Nasional	√			
2.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Menjadi Kebijakan Menteri Koordinator	1. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Logistik Berbasis Moda Perkeretaapian				√
		2. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dan Implementasi kebijakan terkait TKDN			√	
		3. Koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian terkait Industri Manufaktur Nasional			√	
3.	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengendalian Kebijakan di Bidang Infrastruktur	1. Pengendalian Kebijakan Percepatan Pembangunan angkutan massal di Indonesia	√			
		2. Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur konektivitas dan logistik poros maritim		√		
4.	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Dihilangkan	1. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian				√
		2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kebijakan pengembangan jaringan infrastruktur gas			√	
		3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kebijakan percepatan pembangunan PLTSa		√		
		4. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dan Implementasi kebijakan terkait TKDN (tim Nas)			√	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
		5. Koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian terkait Industri manufaktur Nasional			√	
5.	Jumlah Rancangan Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	1. Pengendalian Kebijakan Percepatan Pembangunan angkutan massal di Indonesia	√			
		2. Pengendalian kebijakan infrastruktur Pengolahan Produk Perikanan			√	
		3. Pengendalian dan sinkronisasi Revitalisasi Pelayaran Rakyat guna mendukung tol laut dan perintis				√
		4. Pengendalian kebijakan Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Bahari di KSPN Prioritas			√	
		5. Pengendalian kebijakan terkait industri maritim			√	
6.	Persentase penyelesaian tugas lainnya	Persentase penyelesaian tugas lainnya				
7.	Nilai Evaluasi Internal (AKIP)	Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP				√
8.	Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan	Laporan Hasil Ketaatan Penyampaian Laporan oleh Setmenko				√
9.	Persentase Realisasi Anggaran	Nilai Realisasi Anggaran				√

Jakarta, 18 Januari 2019

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

  
Ridwan Djamaluddin